

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BERDASARKAN TIPOLOGI SERTIFIKASI KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SYARI'AH**

Bambang Agus Sumantri *

*STAI Muhammadiyah Tulungagung
putrawonorejo80@yahoo.com

Abstract

Posts in this journal intended as a study and analysis regarding certification of competence standard typology of Human Resources Managers and employees as a form of profesioanalisme Islamic microfinance services management (BMT, BTM, and KJKS).

Keywords: Standard Operating Procedure (SOP), Typology HR Competency Certification (Managers and Employees), Microfinance Services Sharia (BMT, BTM, KJKS).

Pendahuluan

Pemberlakuan *Asean Economic Community* (AEC)/ Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) terdiri dari gabungan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang beraggotakan 10 negara (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja). Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 berlandaskan pada 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*). Dimana bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi

dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja.

Berkenaan Pemberlakuan *ASEAN Economic Community* (AEC)/ Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 diperlukan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas bagi keberlanjutan dan peningkatan daya saing dalam mengelola perusahaan tidak terkecuali sektor jasa keuangan syariah. Dengan SDM berkualitas, akan tersaji layanan prima kepada konsumen, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah.

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia tak lepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010¹, jumlah penduduk Indonesia yang berada dalam kategori miskin tercatat sebanyak 36,17 juta jiwa (16,7 persen). Jumlah penduduk miskin tersebut bahkan dapat bertambah dua sampai tiga kali lipat jika menggunakan kriteria penduduk miskin yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO). Sehingga, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan konsep Islam, koperasi syariah kemudian didirikan. Nilai-nilai koperasi seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama dinilai sangat cocok untuk memberdayakan rakyat kecil

Pemerintah menargetkan pada 2015 mayoritas pengelola koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah memiliki sertifikasi kompetensi sebagai wujud dari profesionalisme pengelolaan jasa keuangan koperasi. Pengelola koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah (KSP/KJKS) harus bersertifikasi agar reputasinya bisa sejajar dengan lembaga keuangan perbankan. Selanjutnya ada dua poin lagi yang ingin disasar dari program sertifikasi pengelola atau pengurus KSP/KJKS tersebut. Pertama, agar lebih profesional melayani anggotanya, Kedua, agar lebih siap menghadapi era globalisasi, karena satu saat ahli manajerial koperasi asing bisa saja tampil menjadi pengelola

¹Fossei, *Menilik Perkembangan Koperasi Syari'ah*, dalam <http://fossei.org/2013/01/menilik-perkembangan-koperasi-syariah-dan-potensinya-dalam-perbaikan-kesejahteraan-masyarakat/#sthash.NGt8xZXw.dpuf>, diunggah pada 12 Agustus 2014.

koperasi di Indonesia. Jikaantisipasi dilakukan sejak dini, maka pengelolaan oleh warga asing tidak perlu terjadi.²

Secara umum data koperasi di Indonesia sampai Juni 2014³ dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Koperasi (unit)			Jumlah (orang)		
Jumlah	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah Anggota	Jumlah Manajer	Jumlah Karyawan
206.228	144.839	61.449	35.237.990	42.983	420.158

Menurut data Kemenkop dan UKM, total koperasi simpan pinjam (KSP)/usaha simpan pinjam (USP), koperasi dan koperasi kredit di Indonesia sebanyak 71.365 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 2.508 unit merupakan KJKS/usaha jasa keuangan syariah (UJKS). Total aset KJKS/UJKS ini mencapai Rp 13,23 triliun. Padahal, total aset KSP sendiri hanya Rp 18,72 triliun. Pada 2010 hanya 1.800-an (unit KJKS). Jumlahnya bertumbuh setelah banyak BMT sudah memilih badan hukumnya koperasi.⁴

Jenis koperasi terbanyak di Jawa Timur sampai 2011⁵ masih banyak yang berasaskan konvensional yaitu sejumlah 87%. Sedangkan koperasi yang berasaskan syariah di Jawa Timur sejumlah 13%. Hasil data yang diperoleh, menunjukkan bahwa kategori koperasi terbanyak yaitu KSP/USP sebanyak 29%, selanjutnya yaitu koperasi konvensional sebesar 24%, KOPWAN 17%, KUD 10%, KJKS/UJKS 9%, KSU 9% dan Koperasi sekolah/mahasiswa 2%. Rata-rata jumlah anggota koperasi yang aktif sebanyak 444, anggota yang pasif sejumlah 214 serta calon anggota rata-ratanya sebesar 138. Data tersebut menunjukkan bahwa sudah

²Agus Muharram, Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, dalam http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=828:kompotensi-koperasi-pengelola-koperasi-syariah-akan-disertifikasi&catid=50:bind-berita&Itemid=97. Diunggah pada 14 Nopember 2014.

³<http://www.depkop.go.id>

⁴Pariaman kepada *Kompas*, di acara "D-8 Islamic Microfinance Workshop" di Jakarta, Sabtu (12/11/2011), dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/11/12/12521386/Koperasi.Jasa.Keuangan.Syariah.Terus.Tumbuh>

⁵ie.feb.unair.ac.id/.../Summary%20-%20Kegiatan%20P.

banyak anggota yang aktif dalam menjalankan serta mengembangkan koperasi. sehingga partisipasinya dapat dilihat lebih banyak dari pada yang pasif maupun yang statusnya masih calon anggota.

Rekomendasi dari kegiatan pendataan koperasi berjumlah 13 item⁶ oleh Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Laboratorium Pengembangan Ekonomi Pembangunan (LPEP) sebagai berikut :

1. Diperlukan pelatihan laporan keuangan untuk memperbaiki kinerja keuangan Koperasi. Laporan keuangan merupakan barometer dalam menjalankan usaha koperasi. Laporan keuangan koperasi harus sesuai akuntansi koperasi, seperti pembuatan neraca, rugi laba, *cash-flow*, menghitung Sisa Hasil Usaha (SHU) dan lain sebagainya.
2. Mendesain pelatihan pendampingan dan monitoring evaluasi bagi pengurus, pengawas, manajer, karyawan oleh dinas koperasi agar kegiatan pengembangan sesuai dengan kaidah-kaidah perkoperasian.
3. Dukungan sarana dan prasarana untuk membantu kelancaran kegiatan administratif (*software*) dan peralatan kantor (bantuan tidak harus melalui pengadaan sarpras secara langsung kepada koperasi tapi juga bisa melalui *resource sharing* (saling berbagi sarpras) dengan institusi lain seperti kantor kelurahan, kecamatan, dan lain sebagainya.
4. Akses penyediaan modal yang murah bagi koperasi yang tata kelolanya baik dan potensi pengembangannya besar untuk penguatan modal internal yang dipinjamkan kepada anggota dan calon anggota
5. Perlunya menjalin *networking* dengan perusahaan di lingkungan koperasi dalam menunjang aktivitas koperasi melalui kerjasama dalam skema CSR misalnya dengan bantuan modal, pelatihan maupun lainnya.
6. Memfasilitasi hubungan antara industri dengan koperasi (*linkage*) dalam rangka meningkatkan kinerja koperasi untuk menghadapi persaingan.
7. Membangun mekanisme audit internal dan eksternal koperasi. Audit internal koperasi dapat dilakukan oleh pengawas koperasi, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat diantisipasi sedini mungkin.

⁶*Ibid.*

Sedangkan untuk audit eksternal dibutuhkan untuk menjamin transparansi keuangan.

8. Pelatihan mengenai manajemen membangun bisnis dan usaha yang baik dan berkelanjutan
9. Perlunya dibangun suatu media informasi yang baik yang bias diakses oleh seluruh anggota dengan mudah termasuk secara *on line* jika dimungkinkan
10. Perlunya dibentuk koordinasi berjenjang antar pengawas mulai dari tingkat yang lebih kecil seperti di Kelurahan kemudian kecamatan dan akhirnya di tingkat kabupaten
11. Membangun sistem lembaga mikro keuangan syariah pelaporan secara *on line* dan *database* dalam kerangka untuk membangun sistem lembaga mikro keuangan syariah pengawasan yang melekat dan terintegrasi untuk menjamin keberlangsungan koperasi dalam jangka panjang utamanya bagi kopwan sudah melakukan tata kelola yang baik dan yang sudah mencapai *economies of scale*
12. Perlunya dilakukan Kajian mengenai efektifitas program-program/ bantuan-bantuan yang diselenggarakan oleh dinas koperasi/UMKM kepada Koperasi di daerah dalam menunjang keberlangsungan keberadaan koperasi dalam jangka panjang
13. Perlunya dilakukan kajian mengenai membangun sistem lembaga mikro keuangan syariah pelaporan yang terintegrasi dan *database* secara *on line* dengan sistem lembaga mikro keuangan syariah pengawasan dari aspek keuangan maupun organisasi dari beberapa kopwan yang sudah melakukan tata kelola yang baik dan mencapai *economies of scale*.

Perlunya dilakukan Kajian mengenai pola tata kelola dan kinerja koperasi yang dilakukan oleh pengelola terhadap peningkatan kesejahteraan dan kepuasan anggota dan masyarakat (calon anggota) di lingkungan sekitar koperasi.

Koperasi jasa keuangan syariah / unit jasa keuangan syariah (KJKS/UJKS koperasi) hingga akhir Desember 2013 mencatat aset senilai Rp 4,02 triliun atau sekitar 5,04% dari total aset koperasi di Indonesia jasa keuangan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, aset KJKS tercatat Rp 4,01 triliun, sedangkan UJKS koperasi hanya Rp 10 miliar. Meski jumlah asetnya relatif jauh lebih sedikit, jumlah UJKS koperasi tercatat 2.104 unit atau lebih

dari dua kali lipat dibandingkan dengan KJKS yang hanya 1.032 unit. Demikian juga dalam hal jumlah anggotanya. Jumlah anggota UJKS koperasi tercatat mencapai 272.234 orang, sedangkan anggota KJKS hanya 1.032 orang. Meski jumlah unit maupun anggotanya lebih sedikit, KJKS ternyata unggul dalam hal nilai simpanan, modal pinjaman, modal sendiri, penyerahan, dan penyaluran pinjaman.

Kinerja KJKS/UJKS Koperasi (Rp Triliun)⁷

Keterangan	KJKS	UJKS
Jumlah (Unit)	1.032	2.104
Anggota	111.978	272.234
Simpanan	2,30	0,08
M. Pinjaman	0,36	0,08
M. Sendiri	0,41	0,07
Penyertaan	0,07	0,01
Aset	4,01	0,01
Pinjaman	3,08	0,61
SHU	0,01	0,02

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2003⁸ berusaha memotret SDI yang ada di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini berusaha untuk memetakan latar belakang pendidikan, karakteristik keilmuan, dan sumber perekrutan karyawan lembaga keuangan syariah. Dari segi pendidikan, sebagian besar (59 persen) karyawan lembaga keuangan syariah mempunyai kualifikasi S1. Sisanya sebanyak 21 persen D3, 18 persen SLTA, dan 2 persen S2. Dari aspek latarbelakang keilmuan, hanya 10 persen yang mempunyai latarbelakang syariah, selebihnya adalah ilmu umum dan belum ada karyawan yang merupakan lulusan lembaga pendidikan ekonomi Islam. Sedangkan

⁷Bisnis, *Aset Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah*, dalam <http://m.bisnis.com/bisnis-syariah/read/20140313/232/210637/aset-koperasi-jasa-keuangan-syariah-rp402-triliun>. Diunggah pada 14 November 2014.

⁸Ekonomi Profetik, *Profesionalisme di Lembaga Keuangan Syari'ah*, dalam <http://ekonomiprofetik.wordpress.com/2008/08/26/profesionalisme-di-lembaga-keuangan-syariah/>, diunggah pada 14 Nopember 2014.

dari sisi sumber karyawan, sebagian besar (70 persen) merupakan berlatar belakang profesi di lembaga keuangan konvensional. Sisanya sebesar 20 persen merupakan fresh-graduate perguruan tinggi, dan 5 persen pindahan dari lembaga keuangan syariah lainnya.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dari gambaran di atas terlihat bahwa industri ekonomi syariah sudah berkembang dan menjangkau hampir semua aspek industri keuangan. Perkembangan ini akan terus berlanjut seiring dengan permintaan (*demand*) masyarakat akan produk dan jasa perbankan dan keuangan syariah, termasuk lembaga keuangan mikro syariah. Permintaan itu sendiri akan semakin berkembang dengan semakin meluasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah. Dengan demikian, lembaga-lembaga keuangan dan ekonomi syariah harus terus melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang ekonomi syariah dari berbagai aspek kepada masyarakat.

Syarat utama yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan lembaga keuangan mikro syariah adalah pengembangan keahlian dan kompetensi di bidang jasa keuangan syariah. Hal ini dibutuhkan untuk mendorong terjadinya akselerasi dalam inovasi dan meningkatkan kinerja lembaga-lembaga keuangan mikro syariah. Untuk itu diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memaksimalkan pelayanan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan ketentuan-ketentuan mengenai :

1. Manual Mutu
2. Prosedur Kerja
3. Instruksi Kerja
4. Ketentuan Mutu (Persyaratan-persyaratan mutu)
5. Sasaran Mutu
6. Struktur Organisasi
7. Tupoksi dan Kualifikasi/jobdes
8. Arsip (Catatan Mutu)
9. dan dokumen lainnya

Berkaitan penerapan SOP bagi perusahaan atau organisasi bisnis adalah :

- Peningkatan kinerja bagian dan organisasi
- Perbaikan dokumentasi dan administrasi
- Perbaikan dlm pengendalian, pengukuran layanan & proses kerja
- Perbaikan dalam hal komunikasi dan kualitas informasi
- Perbaikan moral sebagian besar personal
- Perbaikan kinerja respon (daya tanggap)
- Perbaikan ttgjawab individu, bagian dan sistem lembaga mikro keuangan syariah manajemen
- Perbaikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab
- Perbaikan dalam konsistensi jaminan mutu dan menjadi acuan dalam perbaikan mutu ke depan (*improvement*)
- Penurunan kerja ulang (*rework*)
- Peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya

Tipologi Sertifikasi Kompetensi SDM (Manajer dan Karyawan)

Berkaitan tentang tipologi sertifikasi kompetensi ini merupakan kompetensi SDM pada level manajer dan karyawan pada Lembaga Jasa Keuangan Mikro Ekonomi Syariah (BMT, BTM, dan KJKS). Dimana penulis klasifikasikan menjadi 5 kompetensi, yaitu Tipologi Manajemen Pemasaran, Tipologi Manajemen Keuangan, Tipologi Manajemen Operasional, Tipologi Manajemen Produksi, Tipologi Manajemen SDM dan Tipologi Manajemen Strategik. Untuk selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

Tipologi Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran berasal dari dua kata yaitu manajemen dan pemasaran. Pemasaran menurut *American Marketing Association* (2007⁹) adalah aktivitas, serangkaian institusi, dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran (*offering*) yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Menurut Kotler dan Armstrong pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk

⁹Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra, *Pemasaran Strategik*. Edisi 2 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012), 3.

menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan (Planning), pengorganisasian (organizing) penggerakan (Actuating) dan pengawasan.

Jadi dapat diartikan bahwa Manajemen Pemasaran adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan – tujuan organisasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah sebagai kegiatan yang direncanakan, dan diorganisasikan yang meliputi pendistribusian barang, penetapan harga dan dilakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat yang tujuannya untuk mendapatkan tempat dipasar agar tujuan utama dari pemasaran dapat tercapai.

Selanjutnya, Tipologi Manajemen Pemasaran terdiri dalam 6. Dalam pemasaran terdapat enam konsep yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi yaitu : konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, konsep pemasaran sosial, dan konsep pemasaran global.

1. Konsep Produksi

Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dimana-mana dan harganya murah. Konsep ini berorientasi pada produksi dengan mengerahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas. Disini tugas manajemen adalah memproduksi barang sebanyak mungkin, karena konsumen dianggap akan menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya beli mereka.

2. Konsep Produk

Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performansi dan ciri-ciri yang terbaik. Tugas manajemen disini adalah membuat produk berkualitas, karena konsumen dianggap menyukai produk berkualitas tinggi dalam penampilan dengan ciri – ciri terbaik.

3. Konsep Penjualan

Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen, dengan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif.

4. Konsep Pemasaran

Konsep pemasaran mengatakan bahwa kungsi untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing.

5. Konsep Pemasaran Sosial

Konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan kepentingan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada para pesaing dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat.

6. Konsep Pemasaran Global

Berkenaan konsep pemasaran global ini, manajer eksekutif berupaya memahami semua faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang mantap. tujuan akhirnya adalah berupaya untuk memenuhi keinginan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan.

Tipologi Manajemen Keuangan

Tipologi Manajemen Keuangan, didasarkan pada Lingkungan Keuangan dan overview, Analisis Financial Statement, Perencanaan keuangan jangka panjang dan pertumbuhan perusahaan, Laporan keuangan dan perpajakan, Analisis financial statement, Perencanaan keuangan jangka panjang dan pertumbuhan perusahaan, *Time Value of Money*, *Capital Budgeting*, *Capital Structure & Cost of Capital*, *Dividends policy*, *Cash & Working Capital Management*, *Receivables & Inventory Management*, *Derivative & Hedging*, dan *Merger dan acquisitions*. Dimana tipologi manajemen keuangan terdiri 2¹⁰, yaitu: Pertama, Akuntansi Publik (akuntansi perpajakan

¹⁰Jusup Al Harjono, *Dasar-Dasar Akuntansi* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1999), t.h.

dan konsultasi manajemen). Kedua, Akuntansi Intern (Akuntansi Biaya: penganggaran, perancangan sistem lembaga mikro keuangan syariah informasi, pemeriksaan intern, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen).

Tipologi Manajemen Operasional

Tipologi Manajemen Operasional, yaitu akad-akad ekonomi syariah. Sistem lembaga mikro keuangan syariah ekonomi syariah merupakan Penerapan Bagi Hasil dalam setiap transaksi (Akad) merupakan upaya menghindari sistem lembaga mikro keuangan syariah bunga (Riba) sedini mungkin. Dimana lembaga jasa keuangan mikro syari'ah menetapkan budaya kerja dengan prinsip - prinsip syariah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan. Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rosulullah yaitu: *Shidiq* yaitu menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan atas kejujuran perkataan dan perbuatan. *Amanah* yaitu menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab. *Fathonah*, yaitu profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan dan konsisten. *Tablig*, yaitu kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.

Melalui budaya kerja tersebut, kemudian munculkan satu bentuk prinsip kerja yang harmoni, prinsip-prinsip kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai berikut: *Pemberdayaan*, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang selalu menstransfer ilmu kewirausahaan melalui pendampingan manajemen, pemasaran, pengembangan sumber daya insani, pengadaan teknologi tepat guna, dan kerja sama bidang finansial lainnya, sehingga mampu memberdayakan para wirausahawan baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar. *Keadilan*, sebagai intermediary institution, dimana menerapkan azas kesepakatan, keadilan, kesetaraan, dan kemitraan, baik antara lembaga dan anggota maupun antar sesama anggota dalam menerapkan bagi hasil usaha. *Pembebasan*, sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, yang berazaskan akhlaqul karimah dan kerahmatan, melalui produk-produknya, insya Allah akan mampu membebaskan umat dari penjajahan ekonomi, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di negeri sendiri.

Hameed (2000) dalam Yaya (2013)¹¹ menyatakan bahwa ada tiga pendekatan yang berkembang dikalangan pakar akuntansi dalam perspektif Islam dalam merumuskan bentuk akuntansi syariah, yaitu pendekatan induktif berbasis akuntansi kontemporer, pendekatan deduktif dari sumber ajaran Islam, dan pendekatan *hybrid*.

Tipologi Manajemen Produksi

Tipologi Manajemen Produksi, yaitu Produk Planning Control (PPC) dimana pengetahuan standar yang dimiliki oleh SDM lembaga mikro keuangan syariah dalam mengetahui karakteristik bidang usaha pengguna jasa keuangannya. Disamping itu kemampuan Forecasting dalam memperkirakan kebutuhan kedepan pengguna jasa keuangan syariah. Dan keterkaitan dengan bisnis yang dimiliki pengguna jasa keuangannya.

Tipologi Manajemen SDM

Tipologi Manajemen SDM Suatu praktek dan kebijakan yang diperlukan untuk menjalankan aspek orang dan personil dari suatu jabatan tertentu, yang meliputi :

- a) melakukan analisis jabatan
- b) merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut para calon pekerja
- c) menyeleksi para calon pekerja
- d) memberi orientasi dan pelatihan karyawan baru
- e) menata olah upah dan gaji
- f) menyediakan insentif dan kesejahteraan
- g) menilai kinerja
- h) mengkomunikasikan
- i) pelatihan dan pengembangan
- j) membangun komitmen karyawan

¹¹Yaya, Rizal. Dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 6.

Tipologi Manajemen Strategik

Manajemen Strategik adalah sekelompok keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi.¹² Dalam hal ini manajemen strategik memiliki enam langkah yang mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategik. Selanjutnya tahapan 6 langkah tersebut, adalah: langkah pertama, Mengenali Misi Organisasi Kini, Sasaran, dan Strategi. langkah kedua, Analisis Eksternal. langkah ketiga, Analisis Internal. langkah keempat, Merumuskan Strategi. langkah kelima, Implementasi Strategi. Dan langkah keenam, Mengevaluasi hasilnya.

Tipologi Manajemen Strategik terdiri: Manajemen Dokumen, Dokumen-Komunikasi-Negosiasi, Negotiation Support, Model Manajemen, Planning and Controlling, Public Relation dan Manajemen Komputer, Proyek Manajemen, Resiko Manajemen Komunikasi.

Kesimpulan

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal ini merupakan sistem lembaga mikro keuangan syariah mempunyai kemampuan dalam memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan lain yang sesuai, dalam bidang mutu, baik mutu produk dalam bidang jasa maupun mutu proses guna mencapai kepuasan pelanggan. Dan SOP sangat bermanfaat untuk membantu mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian yang telah dan atau sedang terjadi, serta hal-hal yang kemudian hari mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan masalah (terjadi ketidaksesuaian). SOP juga merupakan faktor kunci dalam manajemen suatu organisasi, untuk kepentingan evaluasi dan perbaikan/peningkatan efektifitas sistem lembaga mikro keuangan syariah manajemen yang dimiliki. Hasil kinerja SOP ini digunakan sebagai salah satu bahan masukan untuk aktifitas tinjauan manajemen (input) sebagaimana yang dipersyaratkan oleh standar sistem lembaga mikro keuangan syariah manajemen. Disamping itu secara internal akan berdampak terhadap tidak ada dualisme sistem lembaga mikro keuangan syariah manajemen

¹²T.L. Wheelen dan J.D. Hunger, *Strategic Management and Business Policy*, edisi ketujuh (upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000) dalam Stephen P Robbins dan Marry Colter, *Manajemen Edisi 8/Jilid 1* (Jakarta: PT. Indeks, 2009), t.h.

Tipologi Sertifikasi Kompetensi SDM (Manajer dan Karyawan) terdiri dari 5 kompetensi, yaitu Tipologi Manajemen Pemasaran, Tipologi Manajemen Keuangan, Tipologi Manajemen Operasional, Tipologi Manajemen Produksi, dan Tipologi Manajemen Stratejik.

Dimana dengan adanya pemahaman terkait tipologi sertifikasi kompetensi SDM akan memberikan manfaat eksternal dan internal sebagai berikut: lebih kompetitif, peningkatan kesempatan mengikuti kompetisi yang mempersyaratkan standar internasional, peningkatan hubungan yang baik dengan pengguna jasa layanan dan stakeholder serta supplier yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, perbaikan dalam penanganan keluhan (*handling complaint*), penurunan keluhan, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Penerapan SOP dan tipologi sertifikasi kompetensi SDM yang dilaksanakan secara periodik tersebut akan bermanfaat bagi lembaga keuangan mikro syariah, diantaranya mencakup hal-hal dibawah ini :

- Menjamin kesesuaian sistem lembaga mikro keuangan syariah terdokumentasi terhadap persyaratan standar yang menjadi bidang tipologi manajemen;
- Menjamin kesesuaian aktifitas yang diterapkan dengan sistem lembaga mikro keuangan syariah terdokumentasi;
- Menjamin konsistensi penerapan sistem lembaga mikro keuangan syariah lembaga keuangan syariah.
- Memastikan efektifitas penerapan sistem lembaga mikro keuangan syariah lembaga keuangan syariah.
- Meningkatkan/mengembangkan sistem lembaga mikro keuangan syariah lembaga keuangan syariah.

Daftar Pustaka

- Al Harjono, Jusup, *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1999.
- Bisnis, *Aset Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah*, dalam <http://m.bisnis.com/bisnis-syariah/read/20140313/232/210637/aset-koperasi-jasa-keuangan-syariah-rp402-triliun>. Diunggah pada 14 November 2014.

- Fossei, *Menilik Perkembangan Koperasi Syari'ah*, dalam <http://fossei.org/2013/01/menilik-perkembangan-koperasi-syariah-dan-potensinya-dalam-perbaikan-kesejahteraan-masyarakat/#sthash.NGt8xZXw.dpuf>, diunggah pada 12 Agustus 2014.
- Muharram, Agus, Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, dalam http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=828:kompetensi-koperasi-pengelola-koperasi-syariah-akan-disertifikasi&catid=50:bind-berita&Itemid=97. Diunggah pada 14 Nopember 2014.
- Pariaman, kepada *Kompas*, di acara "D-8 Islamic Microfinance Workshop" di Jakarta, Sabtu (12/11/2011), dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/11/12/12521386/Koperasi.Jasa.Kuangan.Syariah.Terus.Tumbuh>
- Profetik, Ekonomi, *Profesionalisme di Lembaga Keuangan Syari'ah*, dalam <http://ekonomiprofetik.wordpress.com/2008/08/26/profesionalisme-di-lembaga-keuangan-syariah/>, diunggah pada 14 Nopember 2014.
- Stephen P Robbins dan Marry Colter, *Manajemen Edisi 8/Jilid 1*. Jakarta: PT. Indeks, 2009.
- Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra. *Pemasaran Strategik. Edisi 2*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2012.
- T.L. Wheelen dan J.D. Hunger, *Strategic Management and Business Policy, edisi ketujuh*. upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.
- Yaya, Rizal. Dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.